

PENGARUH FAKTOR FINANSIAL DAN FAKTOR NON FINANSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA (Studi Empiris Pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar)

Elmiza¹, Fefri Indra Arza²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: elmizapka1@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the effect of Financial Factors (Original Village Income, Transfer Funds, Other Income, Village Expenditures and Extra Time Budget Calculation / SiLPA) and Non-Financial Factors (Area of Village Area, Number of Population, Size of Village Government, Educational Background of Village Head, and Term of Office village head) on the Financial Performance of the Village Government in the nagari in Tanah Datar District in 2016-2018. The data use secondary data. The sampling technique uses Simple Random Sampling method with a total sample of 47 villages with a period of time of 3 years. Analysis of the data using multiple linear regression analysis. The results showed that Original Village Income, Transfer Funds, and Size of Village Government had a negative and significant effect on the Financial Performance of the Village Government. Village Expenditures Government had a positive and significant effect on the Financial Performance of the Village Government. Other Income, Extra Time Budget Calculation/SiLPA, Area of Village Area, Number of Population, Educational Background of Village Head, and Term of Office village head had no effect on the Financial Performance of the Village Government.*

Keywords: *Financial Factors; Financial Performance of the Village Government; Non-Financial Factors.*

How to cite (APA 6th style):

Elmiza & Arza. F.I (2020). Pengaruh Faktor Finansial dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 2(2), Seri C, 2807-2825.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Desa (disebut nagari di provinsi Sumatera Barat) sebagai pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah karena sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa

merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah daerah memiliki peran untuk dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun pengelolaan keuangan yang dikerjakan pemerintah desa.

Penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik. Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta informasi perencanaan dan penganggaran (Novia et.al, 2015). Seperti yang diungkapkan oleh Bupati Kabupaten Tanah Datar bahwa pemeriksaan dan pembinaan yang dilakukan BPK sangat penting untuk meningkatkan kinerja, hal ini juga untuk menjaga diri agar terhindar dari hal-hal yang menyimpang dari ketentuan pengelolaan keuangan negara (www.tanahdatar.go.id). Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar menegaskan bahwa untuk kemajuan pembangunan dan masyarakat, seluruh perangkat daerah harus bekerja secara profesional dan mengedepankan prinsip *good governance*.

Rasio keuangan dapat digunakan sebagai pedoman pengukuran untuk menilai kinerja keuangan pemerintah dalam pengelolaan keuangan (Pratiwi, 2018). Dari hasil pemaparan beberapa peneliti terdahulu mengenai pengaruh masing-masing faktor finansial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian dan diindikasikan terdapatnya *research gap*, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan menambahkan faktor non finansial yang mempengaruhi kinerja keuangan. Contoh publikasi riset pengelolaan keuangan desa di propinsi Sumatra Barat dapat dilihat dalam riset Agustin et.al (2017) mencoba memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari di kabupaten Pasaman Barat. Riset tersebut menemukan bahwa seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemerintah kabupaten Pasaman Barat. Nagari di kabupaten Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari).

meneliti pada lingkup pemerintah kabupaten dan provinsi, sehingga peneliti melakukan penelitian pada tingkat desa agar memiliki keterbaruan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan beberapa rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yaitu penelitian Mahmudi (2010), Halim (2012) dan Merynda Puspitaningrum (2015).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar karena memiliki komitmen terbaik dalam mengelola keuangan dan aset daerah di Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota yang meraih Opini WTP terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Prestasi pemkab tanah datar termasuk cukup menonjol dibandingkan kabupaten maupun kota lainnya, mengingat riset Agustin dan Arza (2019) menemukan anomali antara akuntabilitas dan transparansi publik terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas publik telah meningkat dalam 7 tahun terakhir (2012-2019), dimana seluruh pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat mempublikasikan pada website resmi maupun media massa setiap opini WTP dari BPK atas LKPD. Namun perilaku serupa tidak terjadi dalam konteks transparansi publik, dimana hampir setengah dari 19 pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat yang bersedia

mengungkapkan secara terbatas dokumen-dokumen terkait pengelolaan anggaran daerah (hanya 5-7 dokumen dari total 12 dokumen).

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kinerja keuangan dan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan di setiap nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, maka penulis mengambil judul: **“Pengaruh Faktor Finansial dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa pada Pemerintah Nagari di Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2016-2018”**.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Teori yang menjelaskan hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (sebagai *principal*) yang menggunakan pemerintah (sebagai *agent*) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat (Jensen dan Meckling, 1976). Maka adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat yang mengharuskan pemerintah desa untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya.

Stewardship Theory

Teori yang menggambarkan situasi dimana manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu melainkan untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1991). Akuntansi sektor publik sejak awal perkembangannya telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang menghubungkan antara *stewards* dan *principals*. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah sebagai suatu organisasi non profit yang bertujuan untuk mencapai *good corporate governance*.

Kinerja Keuangan Desa

Kinerja keuangan merupakan ukuran dari pengelolaan keuangan organisasi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban. Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan kemampuan desa untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang ada di desa, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan desa (Bastian, 2006).

Faktor Finansial.

Faktor finansial merupakan aspek keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa. Faktor finansial pada penelitian ini diproksikan dengan Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer, Pendapatan Lain-Lain, Belanja Nagari, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang terdapat dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Semua unsur faktor finansial ini diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Faktor Non Finansial.

Faktor nonfinansial merupakan aspek non keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa. Faktor non finansial pada penelitian ini diproksikan dengan Luas Wilayah Nagari, Jumlah Penduduk Nagari, Ukuran Pemerintah Nagari, Latar Belakang Pendidikan Wali Nagari, dan Masa Jabatan Wali Nagari.

Pengaruh Pendapatan Asli Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Pendapatan asli daerah memberikan arti penting bagi daerah karena nantinya akan dapat dipergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan guna menunjang kesejahteraan masyarakat. Jika sumber keuangan dapat dimanfaatkan dengan optimal maka dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah (Sari *et al.*, 2019). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Nagari Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Pengaruh Dana Transfer terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Desa yang memiliki sumber daya sedikit memerlukan subsidi agar dapat mencapai standar pelayanan minimum. Dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah kabupaten/kota akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah desa bergantung kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan desanya. Hasil penelitian Masdiantini (2016), Prasasti (2016), dan Ilmiyah *et al.* (2017) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar nilai *intergovernmental revenue* yang dimiliki oleh kabupaten/kota, maka semakin menurun kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Dana Transfer Berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Pengaruh Pendapatan Lain-lain terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Komponen terakhir dari pendapatan nagari yang juga menunjukkan kemampuan nagari dalam menggali potensi pendapatannya yaitu pendapatan lain-lain. Semakin besar. Nuzulistyan *et al.* (2017) bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Pendapatan Lain-lain Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Pengaruh Belanja Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pratiwi (2018) membuktikan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. (Aminah, Afiah, & Pratama, 2019) belanja modal mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₄: Belanja Nagari Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

SiLPA merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah (Putra, 2017). Besaran SiLPA yang masih tinggi membawa dampak positif dan negatif bagi daerah. Nabila (2017) menyatakan bahwa Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Pendapatan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Pengaruh Wilayah Luas Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Daerah dengan wilayah yang lebih luas tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar dan Siswanto, 2012). Berdasarkan teori keagenan pemerintah sebagai agen harus cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran untuk mewujudkan daerah yang sejahtera. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Luas Wilayah Nagari Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Pengaruh Jumlah Penduduk Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Darmanto dalam Septarizma (2018) menyatakan bahwa jumlah penduduk merupakan faktor lingkungan dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang mengindikasikan semakin besar jumlah penduduk di suatu daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik, sehingga akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₇: Jumlah Penduduk Nagari Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Penelitian (Aziz, 2016) menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan pemda Kab/Kota di Jawa Timur. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki daerah tersebut (Retnowati, 2016). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₈: Ukuran Pemerintah Desa Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Wali Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Bentuk usaha pemerintah dalam pencapaian kinerja keuangan yang baik harus berdasarkan teori *stewardship* yaitu pemerintah sebagai pelayanan publik non profit. Menurut Sutaryo dalam Tama dan Adi (2018) seorang kepala daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi, pengalaman kerja yang cukup dan umur yang matang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahannya. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

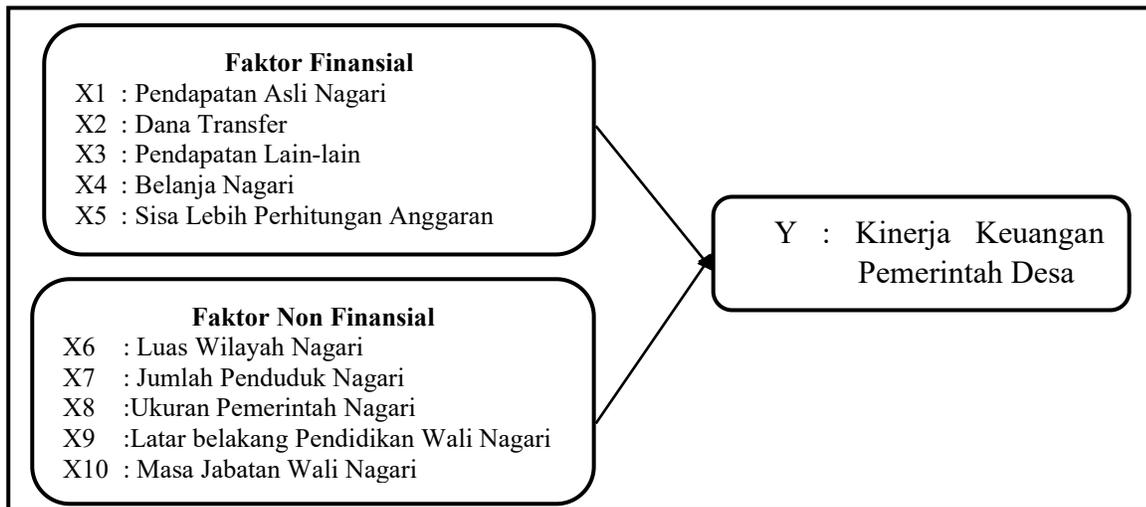
H₉: Latar Belakang Pendidikan Wali Nagari Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Pengaruh Masa Jabatan Wali Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Effendi (2011) mendefinisikan pengalaman kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja, dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Masa kerja lebih lama memungkinkan kepala daerah dapat belajar dan selalu memperbaiki diri setiap keputusan yang telah dilaksanakan (Prayitno, 2012). Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁₀: Masa Jabatan Wali Nagari Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif karena banyak menggunakan angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah nagari yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 75 nagari. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *Simple Random Sampling*. Teknik ini merupakan bagian dari teknik *Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Sugiyono, 2017). Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 47 nagari.

Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber data faktor finansial (pendapatan asli nagari, dana transfer, pendapatan lain-lain, belanja nagari dan sisa lebih perhitungan anggaran) yang terdapat pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes Pemerintah Nagari serta data faktor non finansial (ukuran pemerintah nagari, latar belakang pendidikan wali nagari, dan masa jabatan wali nagari) yang diperoleh langsung dari setiap nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan data faktor non finansial lain yaitu luas wilayah nagari dan jumlah penduduk nagari diperoleh dari Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar <https://tanahdatarkab.bps.go.id>.

Variabel penelitian dan pengukuran

Variabel dependen dalam penelitian adalah kinerja keuangan pemerintah desa yang diukur berdasarkan rasio keuangan (rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio desentralisasi fiskal). Keempat rasio tersebut dijumlahkan sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratiwi (2018), Merynda Puspitaningrum (2015), Masdiantini dan Erawati (2016) untuk memperoleh data kinerja keuangan pemerintah.

a. Rasio Kemandirian Keuangan (Mahmudi, 2016)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa (PADes)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Nagari}} \times 100\%$$

d. Rasio Desentralisasi Fiskal (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

e. Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

$$\text{Kinerja Keuangan} = \text{Rasio Kemandirian Keuangan} + \text{Rasio Efektivitas} + \text{Rasio Aktivitas} + \text{Rasio Desentralisasi Fiskal}$$

Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu faktor finansial dan faktor non finansial.

a. Faktor Finansial (semua angka diambil dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tanpa menghitung sendiri)

1) Pendapatan Asli Nagari

$$\text{Pendapatan Asli Nagari} = \text{Hasil Usaha Nagari} + \text{Lain – lain Pendapatan Asli Nagari yang Sah}$$

2) Dana Transfer

$$\text{Dana Transfer} = \text{Dana Nagari} + \text{Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah} + \text{Alokasi Dana Nagari} + \text{Bantuan Keuangan APBD Kabupaten}$$

3) Pendapatan Lain-lain

4) Belanja Nagari

$$\text{Belanja Nagari} = \text{Belanja Pegawai} + \text{Belanja Barang dan Jasa} + \text{Belanja Modal}$$

5) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

$$\text{Sisa Lebih Perhitungan Anggaran} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Jumlah Pembiayaan}$$

- b. Faktor Non Finansial
- 1) Luas Wilayah Nagari
Diukur dengan proporsi luas wilayah setiap nagari.
 - 2) Jumlah Penduduk Nagari
Diukur dengan proporsi jumlah penduduk setiap nagari.
 - 3) Ukuran Pemerintah Nagari
Diukur dengan proporsi jumlah karyawan/perangkat nagari termasuk kepala jorong.
 - 4) Latar Belakang Pendidikan Wali Nagari
Diukur dengan proporsi tingkat pendidikan terakhir wali nagari yang diambil dari data masing-masing nagari. Indikator pengukuran pendidikan dalam mengolah SPSS menggunakan skala ordinal dengan value: 1 untuk SMA sederajat, 2 untuk Diploma, 3 untuk Strata-1 (S1) dan 4 untuk Strata-2 (S2).
 - 5) Masa Jabatan Wali Nagari
Diukur dengan menghitung lama tahun menempati posisi sebagai wali nagari yang diambil dari data masing-masing nagari.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan program SPSS 25. Tahapan yang digunakan dalam menguji hipotesis pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pengujian hopotesis, dan uji kelayakan model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Pemerintah Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar yang berjumlah 75 nagari. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jumlah sampel 47 nagari yang didapatkan dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2016-2018. Namun setelah dilakukan uji asumsi klasik dari 47 nagari dengan total $n = 141$ dilakukan outliers karena data tidak berdistribusi normal sehingga data yang tersisa yaitu sebanyak $n = 129$.

Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data menggunakan perhitungan untuk memperjelas karakteristik dan keadaan data yang bersangkutan (Ghozali, 2011).

Tabel 1.
Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kinerja Keuangan Pemerintah Nagari	129	1.13	1.92	1.5141	.11735
Pendapatan Asli Nagari	129	.00	57095614.00	8499893.39	10416284.01
Dana Transfer	129	630728000.00	5438851094.00	2208837476.42	811353554.73
Pendapatan Lain-lain	129	.00	320000000.00	11101288.81	36505774.09
Belanja Nagari	129	611412027.00	4859278651.00	2026182035.69	749807313.33

SiLPA	129	14980228.00	2316269030.00	518483071.65	476855738.14
Luas Wilayah Nagari	129	1.25	87.04	18.2403	18.16418
Jumlah Penduduk Nagari	129	1070	15011	4605.39	3042.749
Ukuran Pemerintah Nagari	129	10	34	13.83	4.303
Latar Belakang Pendidikan Wali Nagari	129	1	4	2.16	1.042
Masa Jabatan Wali Nagari	129	5	84	27.39	19.037
Valid N (listwise)	129				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah *One Sample Komogorov-Smirnov* (KS). Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima (berdistribusi normal) (Ghozali, 2016).

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		129
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06034852
Most Extreme Differences	Absolute	.053
	Positive	.049
	Negative	-.053
Test Statistic		.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Hasil output diatas menunjukkan nilai *Test Statistic* $0,200 > 0,05$ atau diatas $0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual dinyatakan memenuhi asumsi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011:105).

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
X1	1.279467	0.781576	Tidak terjadi multikolinieritas
X2	1.040171	0.961381	Tidak terjadi multikolinieritas
X3	1.203265	0.831072	Tidak terjadi multikolinieritas
X4	2.561944	0.390329	Tidak terjadi multikolinieritas
X5	1.483245	0.674198	Tidak terjadi multikolinieritas
X6	2.086405	0.479293	Tidak terjadi multikolinieritas
X7	2.763652	0.361840	Tidak terjadi multikolinieritas

X8	1.840577	0.543308	Tidak terjadi multikolinieritas
X9	1.125266	0.888679	Tidak terjadi multikolinieritas
X10	1.183880	0.844680	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas di atas, dapat diketahui bahwa semua variabel independen nilai (*VIF*) < 10,00 dan nilai *Tolerance* > 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode *t* dalam suatu model regresi linear dengan kesalahan pengganggu pada periode *t-1* (Ghozali 2011, 110).

Tabel 4.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.641 ^a	.411	.361	.06285	2.041
a. Predictors: (Constant), LN_X10, LN_X6, LAG_X2, LN_X1, LN_X9, LN_X3, LN_X5, LN_X8, LN_X4, LN_X7					
b. Dependent Variable: LN_Y					

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 2,041 sementara dari tabel *Durbin Watson* dengan signifikansi 0,05 jumlah sampel sebanyak 129, serta jumlah variabel independen sebanyak 10 variabel (*k*=10) diperoleh nilai *dL* sebesar 1,5493 dan *Du* sebesar 1,8817. Tidak terjadi autokorelasi jika $dU < d < 4-Du$. Data *dU* sebesar 1,8817 sehingga $4-dU$ adalah sebesar 2,1183 maka hasilnya $1,8817 < 2,041 < 2,1183$. Berdasarkan pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah model regresi homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Tabel 5.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.301 ^a	.091	.014	.00680	2.045
a. Predictors: (Constant), LN_X10, LN_X6, LAG_X2, LN_X1, LN_X9, LN_X3, LN_X5, LN_X8, LN_X4, LN_X7					
b. Dependent Variable: RES2					

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Hasil pengujian nilai *Chi square* bisa dihitung dengan cara mengalikan *R Square* dengan jumlah data (n=129). Nilai *Chi Square* hitung sebesar 11,739. Nilai *Chi Square* tabel sebesar 18,307. Maka nilai *Chi Square* hitung < *Chi Square* tabel. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada metode regresi, sehingga model regresi ini layak untuk digunakan dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.582	.448		-5.758	.000
	LN_X1	-.004	.001	-.344	-4.308	.000
	LAG_X2	-.006	.003	-.147	-2.034	.044
	LN_X3	.001	.001	.057	.732	.466
	LN_X4	.146	.025	.674	5.962	.000
	LN_X5	.005	.007	.054	.625	.533
	LN_X6	-.007	.009	-.079	-.775	.440
	LN_X7	.021	.014	.167	1.425	.157
	LN_X8	-.074	.030	-.240	-2.503	.014
	LN_X9	.018	.011	.123	1.637	.104
	LN_X10	-.006	.009	-.050	-.646	.519

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Dari pengolahan data statistik, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda:

$$Y = -2,582 - 0,004X_1 - 0,006X_2 + 0,001X_3 + 0,146X_4 + 0,005X_5 - 0,007X_6 + 0,021X_7 - 0,074X_8 + 0,018X_9 - 0,006X_{10} + 0,448$$

Uji Kelayakan Model

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya ditunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2011:64).

Tabel 7. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Hasil Hipotesis
		B	Std. Error	Beta			Diterima/Tidak diterima
1	(Constant)	-2.582	.448		-5.758	.000	
	LN_X1	-.004	.001	-.344	-4.308	.000	Tidak diterima
	LAG_X2	-.006	.003	-.147	-2.034	.044	Diterima
	LN_X3	.001	.001	.057	.732	.466	Tidak diterima
	LN_X4	.146	.025	.674	5.962	.000	Diterima

LN X5	.005	.007	.054	.625	.533	Tidak diterima
LN X6	-.007	.009	-.079	-.775	.440	Tidak diterima
LN X7	.021	.014	.167	1.425	.157	Tidak diterima
LN X8	-.074	.030	-.240	-2.503	.014	Tidak diterima
LN X9	.018	.011	.123	1.637	.104	Tidak diterima
LN X10	-.006	.009	-.050	-.646	.519	Tidak diterima
a. Dependent Variable: LN Y						

Berdasarkan hasil olahan data statistik, maka dapat diketahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial sebagai berikut:

- a) Nilai T_{hitung} sebesar $-4,308 < T_{tabel}$ sebesar $1,978$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan Pendapatan Asli Nagari berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 ditolak.
- b) Nilai T_{hitung} sebesar $-2,034 < T_{tabel}$ sebesar $1,98$ dan nilai signifikan $0,044 < 0,05$ yang menunjukkan Dana Transfer berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima.
- c) Nilai T_{hitung} sebesar $0,732 < T_{tabel}$ sebesar $1,978$ dan nilai signifikan $0,466 > 0,05$ yang menunjukkan pendapatan lain-lain tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak.
- d) Nilai T_{hitung} sebesar $5,962 > T_{tabel}$ sebesar $1,978$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan Belanja Nagari berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima.
- e) Nilai T_{hitung} sebesar $0,625 < T_{tabel}$ sebesar $1,978$ dan nilai signifikan $0,533 > 0,05$ yang menunjukkan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran/SiLPA tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 5 ditolak.
- f) Nilai T_{hitung} sebesar $-0,775 < T_{tabel}$ sebesar $1,978$ dan nilai signifikan $0,440 > 0,05$ yang menunjukkan Luas Wilayah Nagari tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 6 ditolak.
- g) Nilai T_{hitung} sebesar $1,425 < T_{tabel}$ sebesar $1,978$ dan nilai signifikan $0,157 < 0,05$ yang menunjukkan Jumlah Penduduk Nagari tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 7 ditolak.
- h) Nilai T_{hitung} sebesar $-2,503 < T_{tabel}$ sebesar $1,978$ dan nilai signifikan $0,104 > 0,05$ yang menunjukkan Ukuran Pemerintah Nagari berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 8 ditolak.
- i) Nilai T_{hitung} sebesar $0,625 < T_{tabel}$ sebesar $1,978$ dan nilai signifikan $0,533 > 0,05$ yang menunjukkan Latar Belakang Pendidikan Wali Nagari tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 9 ditolak.
- j) Nilai T_{hitung} sebesar $-0,646 < T_{tabel}$ sebesar $1,978$ dan nilai signifikan $0,519 > 0,05$ yang menunjukkan Masa Jabatan Wali Nagari tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 10 ditolak.

Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:68).

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.325	10	.033	8.228	.000 ^b
	Residual	.466	118	.004		
	Total	.791	128			
a. Dependent Variable: LN_Y						
b. Predictors: (Constant), LN_X10, LN_X6, LAG_X2, LN_X1, LN_X9, LN_X3, LN_X5, LN_X8, LN_X4, LN_X7						

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Nilai F_{hitung} sebesar 8,228 > F_{tabel} sebesar 1,91 dengan signifikansi $0,00^b < 0,05$. Hasil ini menunjukkan H_a diterima dan H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel X berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Y.

Uji Koefisien Determinasi *Adjusted R Square*

Uji Determinasi *Adjusted R Square* digunakan apabila terdapat beberapa variabel independen dalam penelitian berguna untuk melihat seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Tabel 9.
Hasil Uji Determinasi *Adjusted R Square*

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.642 ^a	.412	.357	.06305
a. Predictors: (Constant), LN_X10, LN_X2, LAG_X2, LN_X9, LN_X3, LN_X1, LN_X6, LN_X8, LN_X5, LN_X7, LN_X4				
b. Dependent Variable: LN_Y				

Dari hasil output diatas menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R²* adalah 0,357 atau 35,7%. Hal ini berarti bahwa besar pengaruh dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen (Pendapatan Asli Nagari, Dana Transfer, Pendapatan Lain-Lain, Belanja Nagari, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/SiLPA, Wilayah Nagari, Jumlah Penduduk Nagari, Ukuran Pemerintah Nagari, Latar Belakang Pendidikan Wali Nagari, dan Masa Jabatan Wali Nagari) terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan Pemerintah Desa) adalah 35,7%. Sedangkan sisanya 64,3% (100% - 35,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Pendapatan Asli Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis pertama ditolak. Artinya pendapatan asli nagari berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Pada Pemerintahan Kabupaten tanah datar tidak semua nagari memiliki pendapatan asli nagarinya. Kondisi tersebut dikarenakan pendapatan asli nagari pemerintah desa di Kabupaten Tanah Datar masih terlalu kecil.

Sesuai dengan teori keagenan, pemerintah selaku pihak agen harus mampu mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat artinya pemerintah desa harus mengelola dengan baik kegiatan keuangan atas pendapatan asli desa yang yang diterima pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah dan mendapat

kepercayaan dari prinsipal/masyarakat (Thalib, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novyandra (2016) dan Thalib (2019) yang berpendapat bahwa ukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Pratiwi (2018), Sari (2019) dan Chrisnadwiheryanti (2019). Hasil penelitian menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengaruh Dana Transfer terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kedua diterima. Artinya dana transfer berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Semakin tinggi dana transfer maka kinerja keuangan pemerintah desa akan semakin menurun. Pada Kabupaten Tanah Datar pemerintahan desa (nagari) lebih bergantung pada dana transfer daripada pendapatan asli nagari. Hal ini dikarenakan pemerintah desa (nagari) belum mampu mengelola kekayaan desanya.

Ketergantungan pemerintah desa terhadap dana transfer menyebabkan tingkat kemandirian desa dinilai sangat rendah. Sehingga semakin tinggi dana transfer nagari, akan menyebabkan semakin menurun kinerja keuangan pemerintah desa. Ketergantungan pemerintah desa pada pemerintahan kabupaten/kota di Kabupaten Tanah Datar dinilai masih sangat tinggi, hal ini yang menjadi salah satu permasalahan terkait otonomi dan desentralisasi keuangan desa yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Thalib (2019) dan Chrisnadwiheryanti (2019) menyatakan bahwa ukuran dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Satria *et al.*, (2018) dan (Aminah, Afiah, & Pratama, 2019) menyatakan bahwa *intergovernmental revenue* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Lain-lain terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan lain-lain tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Pada Pemerintahan nagari di Kabupaten tanah datar masih sedikit yang memiliki pendapatan lain-lain. Hal ini dikarenakan pendapatan lain-lain pemerintah desa di Kabupaten Tanah Datar masih sangat kecil.

Sesuai dengan teori keagenan, pemerintah selaku pihak agen harus mampu mempertanggungjawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat artinya pemerintah desa harus mengelola dengan baik kegiatan keuangan atas pendapatan lain-lain yang yang diterima pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah dan mendapat kepercayaan dari prinsipal/masyarakat (Thalib, 2019). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wiguna *et al.*, (2019) menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah provinsi memiliki APBD yang masih kecil yang mengakibatkan biaya untuk pembangunan diambil dari pos anggaran lain.

Pengaruh Belanja Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis keempat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa belanja nagari berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Pada pemerintah nagari di Kabupaten Tanah Datar, apabila

belanja nagari dapat digunakan efektif maka akan berdampak pada perkembangan pembangunan yang sangat pesat dan pengembangan aset yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah dalam membiayai kegiatannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Aziz, 2016) membuktikan bahwa adanya pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Retnowati (2016) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rochmah (2015) yang menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Besaran SiLPA yang masih tinggi membawa dampak positif dan negatif bagi daerah. Setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar memiliki SiLPA yang berbeda-beda besar kecilnya nilai SiLPA tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2017) yang menyatakan bahwa Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Luas Wilayah Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa luas wilayah nagari tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Berdasarkan teori keagenan pemerintah sebagai agen harus cerdas dalam mengalokasikan penerimaan dan pengeluaran untuk mewujudkan daerah yang sejahtera. Apabila pemerintah mampu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja desa secara efektif dan efisien maka pemerintah sudah mampu meningkatkan kinerja keuangannya. Pada pemerintahan nagari di Kabupaten Tanah Datar luas wilayah nagari tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Jumlah Penduduk Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis keenam ditolak. Pada pemerintahan nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan bahwa luas wilayah nagari tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Pratama (2017) yang menyatakan bahwa penduduk/*population* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Natoen (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis ketujuh ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah nagari berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Maka apabila semakin besar ukuran pemerintah nagari maka akan semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk belanja pegawai sehingga kinerja keuangan pemerintah akan semakin menurun. Sehingga dilihat dari hasil penelitian, ukuran pemerintah nagari berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sari (2019) yang menyatakan bahwa ukuran

pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Aziz, 2016) menyatakan bahwa ukuran daerah berpengaruh positif signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan pemda Kab/Kota di Jawa Timur.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Wali Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik, ditemukan bahwa hipotesis kedelapan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Tingkat pendidikan wali nagari tidak terbukti berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah desa. Berdasarkan teori *stewardship* yaitu pemerintah sebagai lembaga yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara maksimal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Adi dan Tama (2018) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Masa Jabatan Wali Nagari terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kesepuluh ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan wali nagari tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Sesuai dengan teori *stewardship*, pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik harus memiliki kemampuan dan keahlian serta pengalaman kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat. Sehingga dilihat dari hasil penelitian, masa jabatan wali nagari tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Misdi (2015) dan Adi dan Tama (2018) yang menyatakan masa kerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor finansial yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Desa yaitu: Pendapatan asli nagari dan Dana transfer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Belanja Nagari berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Pendapatan lain-lain dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.
2. Faktor non finansial yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Desa yaitu: Ukuran pemerintah nagari berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Luas wilayah nagari, Jumlah penduduk nagari, Latar belakang pendidikan wali nagari, dan Masa jabatan wali nagari tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel pada nagari di Kabupaten Tanah Datar karena waktu penelitian yang tidak mencukupi sehingga hasil penelitian belum dapat mewakili seluruh nagari pada kabupaten/kota di Indonesia.
2. Periode waktu pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 tahun yakni dari tahun 2016-2018.
3. Variabel independen pada penelitian ini banyak yang tidak berpengaruh pada variabel dependen sehingga dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan hal-hal yang sangat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari *Adjusted R²* adalah 0,357 atau 35,7% variasi kinerja keuangan pemerintah desa dapat dijelaskan oleh variasi darivariabel independen. Sedangkan sisanya 64,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini .

Saran

1. Bagi pemerintah nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, sebaiknya meningkatkan pendapatan nagari nya, baik pendapatan asli nagari maupun pendapatan lain-lain nagari dengan cara mengelola sumber daya yang ada di nagari masing-masing. Serta menurunkan ketergantungan terhadap dana transfer agar setiap nagari memiliki tingkat kemandirian yang baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambah periode pengamatan dengan ruang lingkup yang lebih luas agar penelitian ini lebih jelas dan lebih lengkap agar hasil penelitiandapat mewakili seluruh nagari (desa) pada kabupaten/kota di Indonesia.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel bebas lain yang relevan dengan kinerja keuangan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra. (2019). *Potrait of Accountability and Transparency in Local Budget Management by the Regional Government in West Sumatera Province, Indonesia: An Anomaly in Digital Era*. 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019). Padang. 154-166.
- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. Vol 5, No 2. Hal 1019-1028.
- Adi, P. H., & Tama, I. G. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 91-113.
- Aminah, I. N., Afiah, N. N., & Pratama, A. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Sikap*, 147-165.
- Ayura, D. P. (2013). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Komitmen Organisasi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). *JEA, Vol.*
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Eksis*.

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Chrisnadwiheryanti, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 3(1), 98-116.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm. Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3 (4):, 305-360.
- Kusnandar, & Siswantoro, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan . *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 1150-1182.
- Misdi. (2015). *Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. Surakarta: digilib.uns.ac.id.
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2), 106-117.
- Novyandra, R. (2016). Pengaruh Belanja Modal Intergovernmental Revenue, Leverage, Size, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Pulau Jawa Tahun 2014. *Eprints Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Novia, Siswita; Arza, Fefri Indra; Agustin, Henri. (2015). Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris pada DPRD dan SKPD Kota Padang). *Jurnal WRA*, 3(1), 529-548.
- Nuzulistyan, K. R., Supriyanto, A., & Paramita, P. D. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pandanaran*, 3(3).
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Prasasti, S. E. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Pratiwi, T. Y. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prayitno, S. 2012. Pengaruh Karakteristik Keuangan Pemerintah Daerah dan Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerinth Daerah. *Tesis Universitas Sebelas Maret*.
- Puspitaningrum, M. 2015. Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi DIY dengan Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai variabel Intervening. *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Putra, F. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Luas Wilayah, Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*.

- Retnowati, R. (2016). Analisis Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Rochmah, S. N. (2015). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekom*, 3(1), 679-692.
- Sari, N. M., & Mustada, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen, Universitas Udayana*, 8(8), 4759-4787.
- Satria, D. I., & Sari, H. P. (2018). Pengaruh Wealth, Intergovernmental Revenue, Leverage Dan Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Universitas Malikussaleh*.
- Septarizma, S., & Atikah. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Eprints Repository Politeknik Negeri Sriwijaya*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sutaryo. (2013). Karakteristik Eksekutif dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurusan Akuntansi FE UNS sutaryofe.staff.uns.ac.id*.
- Tama, I. G., & Adi, P. H. (2018). Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Perspektif Akuntansi*, 1, 91-113.
- Thalib, F. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Jawa Timur Periode 2013-2017. *STIE Perbanas Surabaya*, 1-16.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan lain-lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 28, 85-108.